

BAB III

INOVASI SISTEM APLIKASI PELAYANAN TERPADU APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015-2017

A. Manfaat Inovasi Sistem Aplikasi Pelayanan Terpadu Aparatur Sipil Negara

1. Permudahan Proses Kepegawaian

a. Pengelolaan Database Kepegawaian

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah suatu sistem yang dikembangkan oleh pemerintah, guna mendukung sistem manajemen pegawai negeri sipil yang rasional terintegrasi, dan akurat. Perlunya SIMPEG adalah untuk memantapkan administrasi kepegawaian sebagai upaya memenuhi kebutuhan informasi data pegawai yang cepat, tepat, akuntabel, dan *up to date*. Dengan mengkonversi data manual menjadi data digital ke dalam suatu database dan aplikasi terkomputerisasi dalam satu payung sistem yang disebut sistem informasi kepegawaian berbasis website yang ditujukan untuk penggunaan secara *mobile* dan *flexibel*.

Mengingat pentingnya pengelolaan data pegawai, maka pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian melalui SIMPEG. SIMPEG merupakan salah satu prioritas dalam tahapan pengembangan *E-Government* di Indonesia pada umumnya. Dalam lingkungan yang semakin kompetitif global saat ini, peningkatan produktivitas organisasi adalah penting. Keberhasilan negara

dalam ekonomi global, akan tergantung sepenuhnya dari kinerja organisasi, baik organisasi publik maupun swasta. Seiring dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, diperlukan rancangan mekanisme pendataan yang mengikat seluruh unit kerja terkait, sehingga terjadi integrasi menyeluruh atas aktivitas pendataan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Upaya untuk mewujudkan pendataan yang terintegrasi ini dilakukan dengan membangun mekanisme dan aplikasi pendataan melalui satu pintu. Sistem pendataan berbasis teknologi informasi yang dibangun oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul diberi nama SAPA ASN. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, inovasi SAPA ASN memberikan dampak positif bagi BKPP dan seluruh ASN di Kabupaten Bantul sebagai pengguna inovasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Yahya Pandega selaku Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai di BKPP Kabupaten Bantul.

“Kalau dampak inovasinya yang sudah terasa itu adalah pengelolaan database menjadi lebih mudah, cara kami menangani data-data pegawai yang di tengarai itu salah memasukkan atau mengeluarkan itu lebih mudah. SAPA ini memang dapat menangani segala proses administrasi data kepegawaian”. (Kamis, 30 November 2017).

Dari hasil wawancara dengan Yahya Pandega, dampak yang sudah dirasakan terutama oleh internal BKPP sendiri adalah lebih mudah dalam melakukan pengelolaan database kepegawaian selain itu proses penginputan data-data pegawai menjadi lebih mudah. Manfaat SAPA ASN ini adalah dapat menangani segala proses administrasi data kepegawaian secara terpadu. Administrasi data kepegawaian tersebut seperti pengelolaan, pencatatan dan pelaporan data-data

pegawai. Dampak diterapkannya pengelolaan ASN yang profesional yang sesuai dengan analisa jabatan, penempatan dan kompetensinya masing-masing yang menggunakan basis data informasi dari database kepegawaian dalam Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara (SAPA ASN) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemudahan dalam pengelolaan database kepegawaian yang terpadu di Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Meningkatnya keakuratan database kepegawaian yang terpadu melalui Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara (SAPA ASN) sehingga mampu menyajikan potret kondisi data kepegawaian yang lebih akurat.
3. Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan aksesibilitas dalam pelayanan data kepegawaian yang terpadu melalui Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara (SAPA ASN).

b. Pengelolaan Tunjangan Kinerja dan Presensi

Sistem informasi tidak hanya memproses data menjadi informasi tetapi juga menyalurkan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Sistem informasi tersebut berisikan berbagai elemen yang terdiri dari manusia, barang-barang, konsep-konsep yang saling berhubungan sehingga dapat digunakan sebagai metode yang menggabungkan berbagai elemen tersebut. Informasi adalah data atau fakta yang sudah di proses dengan berbagai bentuk sehingga wujud akhirnya adalah informasi. Informasi mampu mengungkapkan sesuatu yang tidak dapat diduga oleh penerimanya selain itu dapat memperkaya penyajian.

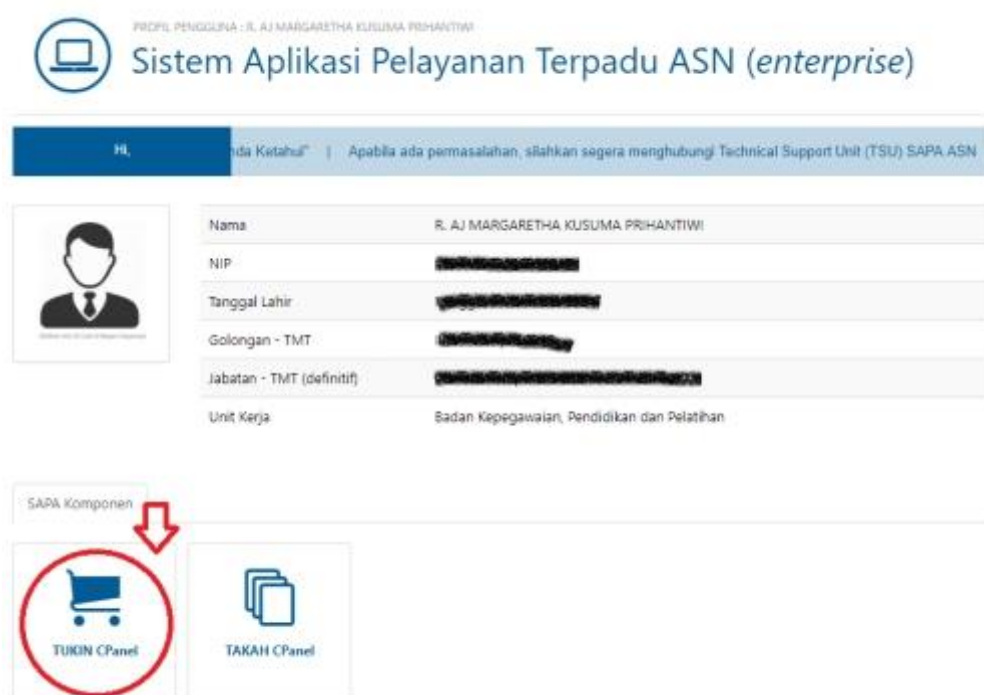
Selain itu informasi memiliki nilai dalam proses pengambilan keputusan karena dengan adanya informasi pengguna dapat menyeleksi hal-hal dengan resiko terkecil tidak hanya itu informasi mampu mengurangi ketidakpastian. Dalam menghasilkan keputusan dan kebijakan yang baik dibutuhkan proses pengolahan data menjadi informasi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi baik di perusahaan maupun organisasi.

“Sebenarnya kalau berbicara masalah pengelolaan tunjangan kinerja ada hubungannya dengan menu SIMTUKIN yang ada dalam SIMPEG, seluruh pegawai yang ada di pemerintah Kabupaten Bantul itu mendapatkan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja tersebut terdiri dari dua variabel yaitu tunjangan statis dan tunjangan dinamis. Tunjangan statis itu didapat melalui absensi melalui finger print sedangkan tunjangan dinamis didapatkan dari laporan dalam buku kerja atas pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pegawai melalui SAPA ASN” (Kamis, 30 November 2017).”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yahya Pandega diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawai yang ada di pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja tersebut terdiri dari dua variabel yaitu tunjangan statis dan tunjangan dinamis. Di dalam halaman SAPA ASN tersedia 2 komponen yaitu tunjangan kinerja dan takah. Namun saat ini aplikasi yang baru diaktifkan adalah menu Tunjangan Kinerja Daerah (TUKIN CPanel). SAPA ASN juga menampilkan profil data diri PNS yang bersangkutan beserta nama atasan langsungnya, seluruh PNS diharapkan dapat memeriksa kembali profil data diri PNS dan atasan langsungnya.

SIMTUKIN adalah sistem informasi manajemen untuk penulisan buku kerja dan perhitungan tunjangan kinerja (Tukin) PNS Kabupaten Bantul. Sistem ini telah mencakup perhitungan kinerja dan menghitung presensi kehadiran secara otomatis

dengan mengambil data secara *real time* dari presensi kehadiran (*finger print*) SIM Presensi. Sehingga tunjangan statis yang didapat melalui absensi dari *finger print* ini dapat terlihat didalam menu SIMTUKIN dan SIMPRESENSI. Untuk mengaksesnya, klik tombol ‘**TUKIN CPanel**’.

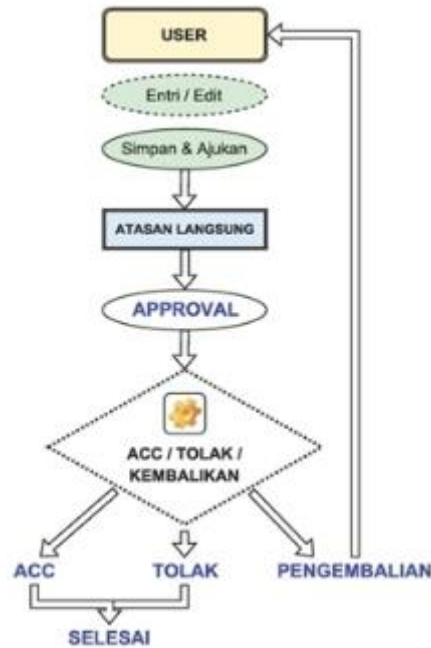


Gambar 2. Menu SIMTUKIN

(Sumber Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul)

Sedangkan untuk tunjangan dinamis, penghitungan tunjangan tersebut didapatkan dari laporan dalam buku kerja atas pekerjaan yang dilakukan oleh ASN dalam menu SIMTUKIN. Di dalam menu SIMTUKIN pekerjaan bawahan harus mendapatkan verifikasi dari atasan langsung. Verifikasi tersebut dapat berupa Acc/Tolak/Kembalikan. Apabila ada buku kerja yang ditolak atau dikembalikan,

akan ada notifikasi '**Buku Kerja Dikembalikan**'. Data pekerjaan yang telah disimpan dan diajukan, tidak dapat diedit kecuali buku kerja dikembalikan oleh atasan langsung. Adapun alur dari pengisian buku kerja adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Pengisian Buku Kerja

(Sumber Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul)

Hak akses SIM Tukin dibagi menjadi 3 yaitu sebagai:

1. PNS bawahan;
2. Atasan langsung (verifikator); dan
3. Administrator Organisasi Perangkat Daerah.

Aplikasi SIMPEG secara strategis adalah suatu sistem yang bergerak di bidang kepegawain yang dapat menumbuhkan pengetahuan, memelihara dan

memperkaya, serta sebagai basis pengambilan keputusan yang tepat dan akurat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, SIMPEG ini menyediakan pengetahuan di bidang kepegawaian. SIMPEG yang handal sebagai unit pelayanan informasi adalah suatu kebutuhan penting demi meningkatkan informasi yang dihasilkan. Sehingga kemampuan suatu sistem dalam mengolah *input* (masukan) sangat berpengaruh dalam hal tersebut sangat yang selanjutnya diproses dan akhirnya menjadi *output* yang berupa informasi yang berkualitas (Diani, 2017). SIMPEG di Kabupaten Bantul berbeda dengan SIMPEG yang ada di Kabupaten lain. Pada pemerintah Kabupaten Bantul SIMPEG adalah salah satu komponen dari SAPA ASN, karena di dalam SAPA ASN terdapat berbagai komponen. SAPA terdiri dari berbagai komponen karena SAPA adalah sistem pelayanan satu pintu yang dapat menangani seluruh pelayanan kepegawaian terutama pelayanan data kepegawaian, di tangani secara terpadu oleh satu sistem aplikasi yang handal. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Yahya bahwa:

“Yang membedakan SIMPEG di Kabupaten lain dengan SIMPEG Kabupaten Bantul adalah SIMPEG adalah bagian dari SAPA ASN. Jadi SAPA itu rumah besarnya sedangkan SIMPEG itu hanya komponennya. Kalau di tempat lain hanya SIMPEG saja, kalau disini untuk mengelola database secara terpadu jadi di dalam SAPA tersebut terdapat SIMPEG, Penilaian Prestasi Kerja, PKG dan lain-lain”. SIMPEG didalam SAPA ASN itu diambil data basenya kedalam SIMTUKIN, SIMPRESENSI. Jadi ketika kami mengelola database di SIMPEG itu semuanya akan terganti semua, misalnya ada orang yang mau dipindah dari instansi A ke instansi B apabila kami sudah mengganti dia sudah tidak bisa presensi di instansi A lagi, kalau dulu kan masih bisa. Cara seperti itu untuk memaksa dia mematuhi SK perpindahannya (Kamis, 30 November 2017).

2. Efektif dan Efisien

Sebuah organisasi adalah pendukung dalam pelaksanaan fungsi manajemen karena dalam organisasi tersebut terdapat keberadaan dan berbagai aktivitas pegawai yang melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sistem yang mengatur kepegawaian di instansi pemerintah adalah sebagai unsur pendukung dalam kelancaran melakukan tugas pada sebuah organisasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai aspek mampu menghasilkan efisiensi karena percepatan dan ketepatan waktu dalam pengelolaan informasi, kemudahan dalam pemrosesan serta ketelitian dan validitas informasi yang dihasilkan. Manfaat jangka panjang SAPA ASN adalah terwujudnya efisiensi, efektifitas dan aksesibilitas dalam pelayanan data kepegawaian yang terpadu melalui Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara (SAPA ASN).

“Apabila berbicara dengan manfaat SAPA ASN untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan pegawai, kalau lebih efektif atau tidak, iya lebih efektif karena tabulasi data atau tabulasi penghitungan kinerja itu bisa diselesaikan oleh sistem dan lebih efisien karena tidak memerlukan cetak atau hard copy lagi dalam pelaporannya” (Kamis, 30 November 2017).

Dari hasil wawancara dengan Yahya Pandega dapat disimpulkan bahwa, inovasi SAPA ASN dirasakan efektif oleh BKPP Kabupaten Bantul karena tabulasi data penghitungan kinerja pegawai dapat diselesaikan oleh sistem aplikasi yang handal tidak dilakukan secara manual, sehingga proses tabulasi data dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat. Selain itu inovasi SAPA ASN dirasa lebih efisien karena data kepegawaian tidak lagi berbentuk hard copy dalam pelaporannya karena sudah ada dalam satu sistem aplikasi. Apabila dalam proses

pelaporan data masih berbentuk hard copy maka dikhawatirkan data tersebut bisa hilang ataupun rusak.

3. Penurunan Tingkat Kesalahan

Dalam menerapkan inovasi sering kali terdapat kendala yang dihadapi hal tersebut juga terjadi di BKPP Kabupaten Bantul dalam menerapkan inovasi SAPA ASN menemui beberapa kendala. Seperti yang dikatakan oleh Yahya Pandega bahwa:

“Kendala dalam penerapan SAPA ASN itu ada dua, yang pertama kendalanya itu adalah karena berawalnya dari data base yang tidak terpadu, sehingga kendalanya adalah kesulitan dalam memadukan data base (pemaduan data base) karena data base itu ada yang namanya riwayat jadi kendalanya disitu. Kendala yang kedua adalah tingkat pemahaman seseorang dalam mengoperasikan komputer dan internet”. “Untuk menurunkan human eror, sebenarnya kami melakukan beberapa tahapan trailer yang dibagi 2 yaitu: bulan pertama trailer untuk Dinas dan Badan yang besar dan 3 bulan selanjutnya trailer untuk instansi yang kecil” (Kamis, 30 November 2017).

(Kamis, 30 November 2017).

Dari hasil wawancara dengan Yahya Pandega Kendala yang dihadapi BKPP Kabupaten Bantul dalam menerapkan SAPA ASN adalah kesulitan dalam memadukan data base yang tidak terpadu karena dalam data base terdapat riwayat. Kendala yang kedua adalah tingkat pemahaman pegawai dalam mengoperasikan komputer dan internet hal tersebut karena tidak semua ASN mampu mengoperasikan komputer dan internet. Selain itu untuk menurunkan tingkat kesalahan dalam pengelolaan SAPA ASN, BKPP melakukan tahapan trailer yang dibagi 2 yaitu:

1. 3 bulan pertama trailer untuk Dinas dan Badan yang besar.
2. 3 bulan selanjutnya trailer untuk instansi yang kecil.

Trailer dilakukan dengan cara mengecek kembali data-data yang ada pada tiap instansi. Di setiap bidang terdapat admin yang di beri hak otoritas pengguna berupa password dan username yang didaftarkan terlebih dahulu menjadi admin. Ketika sudah menjadi admin tugas dari admin ini adalah memasukan data-data yang ada pada tiap bidang, pada 3 bulan pertama kelengkapan data-data pegawai akan dicek apabila masih ada yang belum lengkap maka akan diperbarui kembali. Hal tersebut dilakukan sebagai monitoring kelengkapan data-data yang ada di SAPA ASN.

2. Peningkatan Komunikasi dan Kinerja Organisasi

Menurut Raden Kodarisman dan Eko Nugroho, salah satu manfaat sistem informasi adalah meningkatkan komunikasi antar OPD. Dengan sistem informasi dimaksudkan terciptanya sistem informasi yang terpadu guna meningkatkan kegiatan administrasi kepegawaian yang tertib, teratur, berdaya guna, dan berhasil serta menentukan arah kebijakan tentang mekanisme, koordinasi, komunikasi aliran data dan informasi melalui teknologi informasi. Hal tersebut juga dirasakan oleh pegawai yang ada di pemerintah Kabupaten Bantul. Komunikasi antara OPD menjadi mudah melalui sistem informasi. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Yahya Pandega bahwa:

“Jadi menu SIMTUKIN dalam SAPA ASN itu dibangun agar antara atasan dengan bawahan itu ada komunikasi diantara mereka tidak menggunakan bahasa isyarat karena agar tidak terjadi kebuntuan komunikasi karena ketika saya sudah memasukkan pekerjaan yang sudah saya masukkan tetapi ternyata salah, saya harus berkomunikasi dengan atasan saya untuk menolak atau mengembalikan pekerjaan itu. Tetapi apabila sebaliknya atasan menolak atau mengembalikan pekerjaan itu maka harus komunikasi ke saya untuk direvisi apabila tidak seperti itu ya menggunakan bahasa isyarat. Selain itu inovasi SAPA ASN ini menjadikan pegawai yang ada di pemerintah Kabupaten Bantul menjadi mandiri karena ketika teman-teman (pegawai) disuruh mengisi dalam menu SIMTUKIN pada SAPA ASN itu

akhirnya mereka bisa sendiri, karena apabila mereka tidak mau mengisi maka mereka tidak mendapatkan tunjangan kinerja” (Kamis, 30 November 2017).

Dalam meningkatkan komunikasi antar OPD dilakukan melalui menu SIMTUKIN yang ada pada SAPA ASN karena SIMTUKIN tersebut dibuat agar terdapat komunikasi antara bawahan dan atasan ketika melakukan pekerjaan sehingga tidak terjadi kebuntuan komunikasi antara bawahan dengan atasan. Selain itu proses komunikasi lebih cepat dan akurat sehingga mengefisien waktu dalam melakukan pekerjaan karena tidak dilakukan secara manual melainkan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi melalui menu SIMTUKIN dalam SAPA ASN, pegawai tidak perlu mendatangi atasan ketika memasukkan pekerjaan, begitupun sebaliknya dengan atasan tidak perlu mendatangi bawahan apabila menolak atau mengembalikan pekerjaan untuk direvisi karena hal tersebut memakan waktu yang lama.

Selain itu inovasi SAPA ASN ini meningkatkan kinerja para ASN karena pekerjaan ASN harus di verifikasi oleh atasan, verifikasi tersebut berupa ACC/Tolak/Kembalikan. Di ACC apabila pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pekerjaan yang dilakukan dan mendapat persetujuan dari atasan. Di tolak apabila pekerjaan yang dilakukan sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dan di kembalikan apabila masih ada revisi dari atasan yang harus dikerjakan bawahan. Bawahan dapat mengetahui hal tersebut melalui notifikasi “Buku Kerja Dikembalikan” dalam menu SIMTUKIN.

SAPA ASN juga membuat ASN yang ada di pemerintah Kabupaten Bantul menjadi lebih mandiri serta menambah kemampuan (*skill*) dalam mengoperasikan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan zaman dengan cara mengisi mengisi ketentuan wajib yang ada dalam menu SIMTUKIN dalam SAPA ASN untuk memproses tunjangan kinerja pegawai. Apabila ASN tidak mengisi ketentuan yang ada dalam menu SIMTUKIN yang ada pada SAPA ASN maka ASN yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan kinerja.

3. Pendukung Visi dan Misi Organisasi

Untuk merealisasikan visi dan misi Bupati Bantul H.Suharsono yaitu, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang efisien dan melayani masyarakat, mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menerapkan manajemen yang terbuka dan akuntabel, serta merealisasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu “Bantul projo taman sari sejahtera, demokratis dan agamis, dengan salah 1 misinya yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintah yang empatik, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai salah satu daerah otonom juga sudah mulai menerapkan ketentuan baru dalam menata Aparatur Sipil Negeranya, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan *E-Government* khususnya dalam penyusunan sistem informasi manajemen kepegawaian. Penerapan *E-Government* diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui SAPA ASN. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Yahya selaku Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai berikut ini:

“SAPA ASN ini mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Bantul karena cita-cita Kabupaten Bantul itu adalah menjadi *smart city* di tahun 2019, setidaknya SAPA ini merupakan bagian-bagian dari *smart city* dalam hal pengelolaan data kepegawaian, karena untuk menuju *smart city* kita perlu menuju ke *smart government* terlebih dahulu” (Kamis, 30 November 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yahya Pandega tersebut, dapat disimpulkan bahwa SAPA ASN mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Bantul karena salah satu cita-cita Kabupaten Bantul adalah menjadi *smart city* di tahun 2019. Salah satu misi yang diemban Kabupaten Bantul adalah “meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi” sedang yang menjadi prioritas dari RPJMD Kabupaten Bantul adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. Misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN dan memiliki sasaran yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikatornya indeks tata kelola pemerintahan (*Indonesia Governance Index/IGI*) dengan target cukup. SAPA ASN adalah sebagai perwujudan dari misi tersebut karena SAPA merupakan bagian dari *smart city* dalam hal pengelolaan data kepegawaian, karena untuk menuju *smart city* perlu menuju ke *smart government* terlebih dahulu. Langkah-langkah guna melaksanakan pembenahan pelayanan kepegawaian khususnya yang terkait dengan pelayanan data kepegawaian, dilaksanakan dalam tahapan yang dinamakan dengan MILESTONE, sebagai berikut ini:

Tabel 3.1

Tabel Proses Pemanfaatan SIMPEG

TAHAP UTAMA	WAKTU
Jangka Pendek :	
1. Milestone 1 :	
Persiapan.	
a. Konsultasi dengan Mentor tentang area perubahan.	Minggu ke-1 Agustus 2016.
b. Rapat koordinasi tim internal.	Minggu ke-1 Agustus 2016.
c. Penandatanganan kesepakatan area perubahan.	Minggu ke-1 Agustus 2016.
2. Milestone 2 :	
Penerapan Database Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi.	
a. Rapat koordinasi bersama stakeholder membahas daftar kebutuhan penerapan database kepegawaian berbasis teknologi informasi.	Minggu ke-1 September 2016.
b. Penyusunan laporan hasil rapat terkait daftar kebutuhan SKPD atas database kepegawaian.	Minggu ke-1 September 2016.
3. Milestone 3 :	
Penentuan Optimalisasi <i>e-government</i>.	
a. Rapat koordinasi bersama stakeholder membahas bentuk optimalisasi <i>e-government</i> .	Minggu ke-1 September 2016.
b. Penyusunan laporan hasil rapat terkait bentuk optimalisasi <i>e-government</i> .	Minggu ke-1 September 2016.
4. Milestone 4 :	
Pembaharuan Database Kepegawaian.	

<p>a. Pengumpulan materi data kepegawaian yang dibutuhkan untuk pembaharuan database kepegawaian.</p> <p>b. Pelaksanaan pembaharuan database kepegawaian ASN di lingkungan BKD Kabupaten Bantul.</p>	<p>Minggu ke-2 September 2016.</p> <p>Minggu ke-2 September 2016.</p>
<p>5. Milestone 5 :</p> <p>Pemaduan Database Kepegawaian.</p> <p>a. Pengumpulan materi data kepegawaian yang telah diperbaharui untuk pemaduan database kepegawaian.</p> <p>b. Pelaksanaan pemaduan database kepegawaian ASN di lingkungan BKD Kabupaten Bantul.</p>	<p>Minggu ke-2 September 2016.</p> <p>Minggu ke-2 September 2016.</p>
<p>6. Milestone 6 :</p> <p>Pembuatan Database Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi.</p> <p>a. Pembuatan database berbasis teknologi informasi berdasarkan pada hasil pengumpulan dan pemaduan database kepegawaian ASN di lingkungan BKD Kabupaten Bantul.</p> <p>b. Perencanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), meliputi penentuan kebutuhan aplikasi yang akan dibuat berdasarkan kebutuhan.</p>	<p>Minggu ke-3 September 2016.</p> <p>Minggu ke-3 September 2016.</p>
<p>7. Milestone 7 :</p> <p>Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.</p> <p>a. Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dengan telah memahami kebutuhan layanan data kepegawaian, maka dapat dibuat rancangan aplikasi terlebih dahulu.</p> <p>b. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), meliputi pembuatan aplikasi sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>c. Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang telah selesai dibuat.</p>	<p>Minggu ke-4 September 2016</p> <p>Minggu ke-1 1Oktober s/d ke-1 November 2016.</p> <p>Minggu ke-1 1Oktober s/d ke-1 November 2016.</p>

d. Uji coba Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang telah dibuat.	Minggu ke-1 Oktober s/d ke-1 November 2016.
8. Milestone 8 : Monitoring dan Evaluasi serta Penyusunan Laporan Proyek Perubahan.	
a. Penyusunan instrumen evaluasi.	Minggu ke-2 November 2016.
b. Pelaksanaan evaluasi.	Minggu ke-2 November 2016
c. Penyusunan laporan implementasi proyek perubahan (<i>executive summary</i>).	Minggu ke-2 November 2016
Jangka Menengah :	
1. Pembaharuan Database Kepegawaian (<i>lanjutan</i>). a. Pengumpulan materi data kepegawaian dari yang dibutuhkan untuk pembaharuan database kepegawaian.	Triwulan I Tahun 2017.
b. Pelaksanaan pembaharuan database kepegawaian ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.	Triwulan I Tahun 2017
2. Pemaduan Database Kepegawaian (<i>lanjutan</i>). a. Pengumpulan materi data yang telah diperbaharui untuk pemaduan database kepegawaian.	Triwulan I Tahun 2017.
b. Pelaksanaan pemaduan database kepegawaian ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.	Triwulan I Tahun 2017.
3. Pembuatan database berbasis teknologi informasi berdasarkan pada hasil pengumpulan dan pemaduan database kepegawaian ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul (<i>lanjutan</i>).	Triwulan II Tahun 2017.
4. Pengusulan penambahan <i>bandwith</i> koneksi internet.	Triwulan II Tahun 2017.

5. Pengusulan penambahan kapasitas <i>server (data centre)</i> .	Triwulan II Tahun 2017.
6. Pengintegrasian database kepegawaian kedalam <i>server (data centre)</i> .	Triwulan II Tahun 2017.
7. Pengusulan alokasi <i>Internet Protocol Public (IP Public)</i> untuk layanan data kepegawaian.	Triwulan III Tahun 2017.
8. Pelaksanaan pelayanan data kepegawaian yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).	Triwulan IV Tahun 2017.
Jangka Panjang :	
1. Pembaharuan Database Kepegawaian (<i>lanjutan</i>). a. Pengumpulan materi data kepegawaian dari yang dibutuhkan untuk pembaharuan database kepegawaian. b. Pelaksanaan pembaharuan database kepegawaian seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.	Triwulan I Tahun 2018. Triwulan I Tahun 2018.
2. Pemaduan Database Kepegawaian (<i>lanjutan</i>). a. Pengumpulan materi data yang telah diperbaharui untuk pemaduan database kepegawaian. b. Pelaksanaan pemaduan database kepegawaian seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.	Triwulan I Tahun 2018. Triwulan I Tahun 2018.
3. Pembuatan database berbasis teknologi informasi berdasarkan pada hasil pengumpulan dan pemaduan database kepegawaian seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul (<i>lanjutan</i>).	Triwulan II Tahun 2018.
4. Pembukaan akses database kepegawaian yang berbasis teknologi informasi untuk seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) guna mempermudah dalam hal mengakses data kepegawaian.	Triwulan III Tahun 2018.
5. Penyajian informasi terkait dengan data kepegawaian yang berbasis teknologi informasi untuk masyarakat umum melalui Sistem Informasi Manajemen	Triwulan III Tahun 2018.

Kepegawaian (SIMPEG) guna mendukung kebijakan Pemerintah terkait keterbukaan informasi publik.	
6. Pelaksanaan pelayanan data kepegawaian secara online berbasis teknologi informasi dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.	Triwulan IV Tahun 2018.
7. Penggunaan database kepegawaian yang berbasis teknologi informasi untuk melaksanakan semua kegiatan yang membutuhkan data kepegawaian.	Triwulan IV Tahun 2018.
8. Pengelolaan ASN yang profesional yang sesuai dengan analisa jabatan, penempatan dan kompetensinya masing-masing yang menggunakan basis data informasi dari database kepegawaian dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).	Triwulan IV Tahun 2018.

(Sumber Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul)

1. Persiapan (Milestone 1)

a. Konsultasi dengan Mentor

Sebelum melaksanakan inovasi SAPA ASN BKPP selaku *project leader* sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan mentor terkait area inovasi SAPA ASN. Salah satu permasalahan yang mendesak untuk diadakan pembenahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Administrasi Kepegawaian pada Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul adalah belum terpadunya layanan data kepegawaian. Melihat hal tersebut sehingga BKPP perlu melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan kepegawaian khususnya yang berhubungan dengan pelayanan data kepegawaian. Diharapkan di masa yang akan datang teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam pelayanan kepegawaian terutama yang berhubungan dengan pelayanan data kepegawaian, dengan pemanfaatan teknologi tersebut maka

dapat disajikan data kepegawaian yang terpadu. Capaian dari tahapan ini diharapkan Mentor dapat memahami seluruh rencana proyek inovasi yang akan dilaksanakan.

b. Rapat koordinasi tim internal.

Selanjutnya setelah diputuskan antara BKPP dan Mentor terkait dengan inovasi yang akan diterapkan iniyaitu Tata Laksana terkait dengan melaksanakan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang Terpadu di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, maka BKPP sebagai *project leader* melaksanakan rapat koordinasi internal bersama tim untuk menjelaskan rencana dan langkah-langkah untuk melaksanakan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang terpadu di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Capaian dari tahapan ini diharapkan tim internal dapat memahami seluruh rencana proyek inovasi yang akan dilaksanakan.

c. Penandatanganan kesepakatan area perubahan.

Setelah terjadi kesepakatan antara *poject leader* dan mentor, maka selanjutnya dilaksanakan penandatanganan kesepakatan inovasi yang akan menjadi dasar dilaksanakannya inovasi ini. Capaian dari tahapan ini diharapkan Mentor dapat menyetujui rencana proyek inovasi yang akan dilaksanakan dan bersedia menandatangani rancangan proyek perubahan.

2. Penerapan Database Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi
(Milestone 2)

- a. Rapat koordinasi bersama stakeholder membahas daftar kebutuhan penerapan database kepegawaian berbasis teknologi informasi.

Sebelumnya BKPP sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama stakeholder yang bertujuan untuk menjelaskan kepada stakeholder terkait rencana dan langkah-langkah untuk melaksanakan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang terpadu di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Capaian dari tahapan ini diharapkan stakeholder memahami seluruh rencana proyek inovasi, selain itu juga dapat tersusunnya Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul tentang Tim Proyek Perubahan.

- b. Penyusunan laporan hasil rapat terkait daftar kebutuhan SKPD atas database kepegawaian.

Setelah dilaksanakannya rapat koordinasi bersama stakeholder, maka dapat diketahui daftar kebutuhan masing-masing SKPD atas database kepegawaian. Capaian dari tahapan ini adalah tersusunnya daftar kebutuhan SKPD atas database kepegawaian.

3. Penentuan Optimalisasi *E-Government* (Milestone 3)

- a. Rapat koordinasi bersama stakeholder membahas bentuk optimalisasi *E-Government*.

BKPP melaksanakan rapat koordinasi bersama stakeholder dalam rangka menentukan bentuk optimalisasi *E-Government*. Termasuk di dalamnya di bahas penyusunan bentuk rencana optimalisasi *E-Government* terkait data kepegawaian melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Capaian

dari tahapan ini adalah tersusunnya bentuk rencana optimalisasi *E-Government* terkait data kepegawaian.

- b. Penyusunan laporan hasil rapat terkait bentuk optimalisasi *E-Government*.

Berdasarkan hasil rapat bersama dengan stakeholder untuk menentukan bentuk optimalisasi *E-Government*, telah ditentukan beberapa layanan yang akan dilaksanakan melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Capaian dari tahapan ini adalah tersusunnya daftar bentuk optimalisasi *E-Government* melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

4. Pembaharuan Database Kepegawaian (Milestone 4)

- a. Pengumpulan materi data kepegawaian yang dibutuhkan untuk pembaharuan database kepegawaian.

Dalam rangka untuk melaksanakan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), terlebih dahulu dibutuhkan pengumpulan materi data kepegawaian yang dibutuhkan yang kemudian akan digunakan untuk pembaruan database kepegawaian. Pengumpulan data kepegawaian pada tahap ini terlebih dahulu dilakukan untuk data kepegawaian ASN di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul. Capaian dari tahapan ini adalah terkumpulnya materi data kepegawaian ASN di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.

- b. Pelaksanaan pembaharuan database kepegawaian ASN di lingkungan BKPP Kabupaten Bantul.

Setelah tahap pengumpulan materi data kepegawaian ASN di lingkungan BKPP Kabupaten Bantul dilaksanakan, maka selanjutnya akan dilakukan pembaharuan database kepegawaian berdasarkan tambahan data-data baru yang dimungkinkan ada. Capaian dari tahapan ini adalah terlaksananya pembaharuan data kepegawaian ASN di lingkungan BKPP Kabupaten Bantul.

5. Pemaduan Database Kepegawaian (Milestone 5)

- a. Pengumpulan materi data kepegawaian yang telah diperbaharui untuk pemaduan database kepegawaian.

Setelah dilakukan pembaruan data kepegawaian ASN di lingkungan BKPP Kabupaten Bantul, maka selanjutnya data kepegawaian tersebut akan dikumpulkan untuk proses selanjutnya. Capaian dari tahapan ini adalah terkumpulnya materi data kepegawaian ASN di lingkungan BKPP Kabupaten Bantul yang telah diperbaharui.

- b. Pelaksanaan pemaduan database kepegawaian ASN di lingkungan BKPP Kabupaten Bantul.

Setelah dilakukan langkah pembaharuan data kepegawaian ASN di lingkungan BKPP Kabupaten Bantul, maka selanjutnya akan dilaksanakan pemaduan database kepegawaian. Capaian dari tahapan ini adalah terlaksananya pemaduan database kepegawaian ASN di lingkungan BKPP Kabupaten Bantul.

6. Pembuatan Database Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi
(Milestone 6)

- a. Pembuatan database berbasis teknologi informasi berdasarkan pada hasil pengumpulan dan pepaduan database kepegawaian ASN di lingkungan BKPP Kabupaten Bantul.

Pembuatan database kepegawaian berbasis teknologi informasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak phpMyAdmin. phpMyAdmin adalah perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui jejaring internet World Wide Web. phpMyAdmin mendukung berbagai operasi MySQL. Capaian dari tahapan ini adalah terlaksananya pembuatan database kepegawaian berbasis teknologi informasi.

- b. Perencanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), meliputi penentuan kebutuhan aplikasi yang akan dibuat berdasarkan kebutuhan.

Sebelum dilaksanakan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), terlebih dahulu akan disusun perencanaan yang akan digunakan untuk acuan pelaksanaan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Capaian dari tahapan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

7. Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Milestone 7)

1. Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), dengan telah memahami kebutuhan layanan data kepegawaian, maka dapat dibuat rancangan aplikasi terlebih dahulu.

Sebelum melakukan pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) perlu dilakukan perancangan sistem karena pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila dilakukan terlebih dahulu perancangan sistemnya. Capaian dari tahapan ini adalah terlaksananya perancangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

2. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), meliputi pembuatan aplikasi sesuai dengan kebutuhan.

Setelah materi data kepegawaian semua telah terkumpul, selanjutnya dilakukan proses pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Capaian dari tahapan ini adalah terbangunnya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

3. Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang telah selesai dibuat.

Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dilaksanakan untuk melihat apakah masih ada kesalahan-kesalahan pemrograman yang terjadi termasuk kemungkinan adanya celah-celah keamanan yang dapat diintervensi dari pihak luar dan merusak Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian (SIMPEG). Capaian tahapan ini adalah terlaksananya evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

4. Uji coba Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang telah dibuat.

Uji coba Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada tahapan ini dilakukan secara internal terlebih dahulu oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul. Capaian tahapan ini adalah terlaksananya uji coba Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

8. Monitoring dan Evaluasi serta Penyusunan Laporan Proyek Perubahan (Milestone 8)

1. Penyusunan instrumen evaluasi.

Untuk melaksanakan evaluasi proyek perubahan yang telah dilaksanakan diperlukan instrumen evaluasi yang nantinya akan digunakan untuk panduan dalam pelaksanaan evaluasi. Capaian tahapan ini adalah tersusunnya instrumen evaluasi proyek inovasi SAPA ASN.

2. Pelaksanaan evaluasi.

Pelaksanaan evaluasi proyek inovasi SAPA ASN dilakukan untuk melihat sejauh mana proyek perubahan dapat terlaksana dengan baik. Capaian tahapan ini adalah terlaksananya evaluasi proyek inovasi.

3. Penyusunan laporan implementasi proyek perubahan (*executive summary*).

Seluruh proses pelaksanaan proyek perubahan dari mulai tahap persiapan sampai dengan tahap evaluasi dilaporkan dalam laporan implementasi proyek perubahan (*executive summary*).Capaian tahapan ini adalah terlaksananya penyusunan laporan implementasi proyek perubahan (*executive summary*).

B. Faktor-Faktor Penunjang Pemanfaatan SAPA ASN

Menurut Parker dalam (Kumorotomo dan Margono, 2009:16), Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis komputer adalah “suatu sistem informasi manajemen yang menempatkan perkakas pengolah data komputer dalam kedudukan yang penting, dan secara garis besar Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:”

1. Manusia (*Brainware*)

Harus memperhatikan unsur manusia untuk setiap Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang berbasis teknologi, agar sistem yang diciptakan tersebut bermanfaat. Perlu diingat bahwa manusia adalah faktor penentu keberhasilan dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) karena informasi yang dihasilkan oleh SIM yang nantinya akan digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia.

“Kebetulan dalam kita membangun SAPA itu sebenarnya DINASKOMINFO sudah menyediakan server yang mumpuni atau server yang sangat handal ketika mereka mengadakan pengadaan pas kami sudah jadi. Untuk masalah server tetap ada di KOMINFO tetapi untuk pengelolaannya dilakukan di sini. Jadi di BKPP tepatnya di Bidang Data Subbid Data dan Informasi Pegawai ada yang namanya jabatan Pranata

Komputer. Kalau superuser SAPA ASN itu Bapak Bakti dia jabatannya yaitu tadi pranata komputer”(Jumat, 22 Desember 2017).

Dari hasil wawancara dengan Yahya Pandega diatas dapat disimpulkan bahwa brainware dalam pengelolaan SAPA ASN SAPA terdapat di Bidang Data di Subbid Data dan Informasi Pegawai. Pada Bidang Data di Subbid Data dan Informasi Pegawai terdapat jabatan pranata komputer yang salah satu tugasnya adalah mengelola dan mengoperasikan SAPA ASN namun untuk masalah server tetap ada di KOMINFO. Super user dari SAPA ASN adalah Bakti Kurnianto Nur Prasetyo yang jabatannya adalah pranata komputer. Berikut ini adalah profil user SAPA ASN Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.

Tabel 3.2

**Profil User SAPA ASN Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bantul**

a. Super User

(Sumber Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul)

No	Nama	Jabatan	Lulusan	Diklat
1	Bakti Kurnianto Nur Prasetyo	Pranata Komputer	UGM	Pemrograman berbasis Android

2. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras (*hardware*) mengarah pada peralatan seperti mesin, karena perangkat keras terdiri dari komputer beserta semua perangkat pendukungnya.

Perangkat pendukung tersebut adalah peralatan keluaran, peralatan penyimpanan dan peralatan komunikasi. Berdasarkan wawancara dengan Yahya Pandega menyatakan bahwa:

“Berbicara masalah perangkat keras itu menjadi masalah saya pribadi. Kami selalu mengganti perangkat-perangkat keras yang sudah tidak *up to date*. Tidak hanya mengupgrade tetapi ketika itu sudah tidak bisa digunakan ya itu kami ganti” (Kamis, 30 November 2017).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan perangkat keras menjadi prioritas BKPP. Apabila terdapat perangkat keras yang rusak atau sudah tidak dapat digunakan maka BKPP segera menggantinya hal tersebut dilakukan demi kelancaran pengelolaan dan pengoperasian SAPA ASN karena SAPA ASN adalah sebagai wujud dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPP.

Dalam mengelola SAPA ASN diperlukan perangkat keras yang memenuhi standar kealayaan serta handal untuk mengoperasikan SAPA ASN tersebut karena SAPA ASN ini melayani berbagai layanan kepegawaian yang ada di BKPP termasuk pengelolaan data kepegawaian. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yahya menjelaskan bahwa:

“Perangkat keras yang sesuai standar itu saat ini kami berusaha mencoba melakukan pemenuhan perangkat keras yang handal khususnya untuk Bidang Data Subbid Data dan Informasi terlebih dahulu setelah itu ada di masing-masing bidang. Kebetulan pada tahun ini dan tahun depan akan melakukan upgrade beberapa visi. Dan perangkat keras disini tidak sering terjadi kerusakan” (Kamis, 30 November 2017).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BKPP mencoba memenuhi kebutuhan perangkat keras sesuai dengan standar kelayakan untuk

mengoperasikan SAPA ASN terutama pada Bidang Data Subid Data dan Informasi Pegawai. Ketersediaan perangkat keras yang ada di BKPP jarang terjadi kerusakan. Berikut ini adalah ketersediaan perangkat keras yang ada di BKPP:

Tabel 3.3

Data Aset Per 31 Desember 2016

Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Bantul

No	Jenis Barang	Jumlah Aset Keseluruhan	Jumlah Aset Rusak	Jumlah Aset Yang Tidak Digunakan
1	Komputer	38	-	-
2	CPU	2	-	-
3	Monitor	2	-	-
4	Server	2	-	-
5	Printer	33	-	-
6	UPS 600 watt	2	-	-
7	UPS	10	-	-
8	DVD Writer External	1	-	-
9	External Hardisk	1	-	-
10	Hardisk 80 GB	5	-	-
11	DVD Writer Super	1	-	-
12	Router	1	-	-
13	Wireless/ Wifi	1	-	-
14	Ethernet Switch	1	-	-
15	Notebook/Laptop	8	-	-
16	Keyboard	35	-	-
17	Mouse	35	-	-
18	LCD Projektor	2	-	-
19	AC Split	11	-	-
20	Brankas	1	-	-
21	CCTV	1	-	-
22	Kamera DSLR	1	-	-

23	HUB	2	-	-
----	-----	---	---	---

(Sumber Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul Data
Periode 30 Juni 2017)

3. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak mengarah kepada program-program komputer beserta petunjuk-petunjuk pendukungnya. Yang disebut program komputer adalah intruksi-intruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang memerintahkan bagian-bagian dari perangkat keras Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersedia. Didalam medium input/output program komputer biasanya disimpan. Misalnya *pita atau compact disk* yang kemudian dipakai pada komputer dalam fungsi pengolahannya. Berdasarkan wawancara dengan Bakti Kurnianto Nur Prasetyo selaku super user SAPA ASN menjelaskan bahwa:

“Perangkat lunak sistem itu menggunakan *frame work Joomla* dan databasenya *My SQL*. Dan perangkat lunak bahasa pemrograman yang digunakan adalah *phpMyAdmin*. Selama ini software belum pernah terjadi masalah dan terserang virus dan kami tidak melakukan pencegahan terhadap virus karena selama ini tidak ada virus yang masuk” (Kamis, 22 Desember 2017).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak yang digunakan adalah *frame work Joomla* seperti yang digunakan dalam website-website pemerintah seperti biasanya dan databasenya *My SQL* serta perangkat lunak bahasa pemrograman yang digunakan adalah *phpMyAdmin*. *phpMyAdmin* adalah perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui jejaring internet World

Wide Web. *phpMyAdmin* mendukung berbagai operasi MySQL. Selama ini software dalam SAPA ASN belum pernah terjadi masalah dan terserang virus sehingga data yang ada pada SAPA ASN cukup aman dan selama ini BKPP tidak melakukan pencegahan terhadap virus pada SAPA ASN karena selama ini tidak ada virus yang masuk. Untuk dapat menjalankan SAPA ASN, spesifikasi perangkat lunak yang diperlukan yaitu:

1. Microsoft Windows Operating System
 - a. Windows 7 32 & 64 Bit
 - b. Windows 8 32 & 64 Bit
 - c. Windows 8.1 32 & 64 Bit
 - d. Windows 10 32 & 64 Bit
 - e. Layar Monitor dengan resolusi minimal 1024 x 768
2. Browser Internet Modern
 - a. Mozilla Firefox
 - b. Google Chrome
 - c. Safari
 - d. Opera
 - e. Comodo
 - f. UC Browser

4. Data

Data adalah fakta-fakta yang akan dibuat menjadi informasi yang bermanfaat. Data inilah yang nantinya akan dipilih, dimodifikasi atau diperbarui oleh program-program komputer agar dapat menjadi informasi tersebut. Sehingga data tersebut adalah bahan yang masih mentah yang membutuhkan proses terlebih dahulu yang selanjutnya baru dapat digunakan.

“SAPA itu kan rumah besarnya di dalamnya ada SIMPEG. SIMPEG itu sebenarnya terdiri dari beberapa komponen data. Ada data jabatan, ada data golongan, ada data cuti dan lain-lain. Pengelolaan SAPA itu ada di Bidang Data di Subbid Data dan Informasi Pegawai. Tetapi datanya itu berasal dari masing-masing bidang karena kami tidak bisa memproduksi data yang memproduksi data itu bidang-bidang, kenapa kami tidak bisa memproduksi data karena kami tidak punya kewenangan untuk memproduksi data itu. Kalau data mutasi berarti bidang mutasi, mutasi itu terdiri dari kenaikan golongan, pindah keluar masuk, pensiun itu juga mutasi. Jadi di SIMPEG itu data-data diproduksi oleh bidang-bidang yang lain yang menggunakan SAPA juga, jadi ketika kami mengelolanya maka secara otomatis data itu update sendiri. Kalau yang mengelola dan mengoperasikan SAPA itu ada yang namanya pranata komputer disini, jabatan pranata komputer itu salah satu tugasnya adalah mengelola SAPA. Jabatan pranata komputer itu salah satu tugasnya adalah mengelola SAPA” (Jumat, 22 Desember 2017).

“Kebetulan dalam kita membangun SAPA itu sebenarnya DINASKOMINFO sudah menyediakan server yang mumpuni atau server yang sangat handal ketika mereka mengadakan pengadaan pas kami sudah jadi. Untuk masalah server tetap ada di KOMINFO tetapi untuk pengelolaannya dilakukan di sini” (Jumat, 22 Desember 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yahya Pandega diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan SAPA terdapat di Bidang Data di Subbid Data dan Informasi Pegawai. Namun data yang ada dalam SAPA tersebut berasal dari masing-masing bidang karena Bidang Data di Subbid Data dan Informasi Pegawai tidak dapat memproduksi data dan tidak punya kewenangan untuk memproduksi data. Data-data tersebut diproduksi oleh setiap bidang, pada setiap bidang ada yang

namanya admin yang terlebih dahulu didaftarkan. Admin pada setiap bidang inilah yang nantinya akan memasukkan data tersebut ke dalam SAPA ASN. Misalnya Bidang Mutasi memproduksi data mutasi setelah data diproduksi kemudian tugas dari admin inilah yang memasukkan data tersebut ke dalam SAPA ASN. Sehingga dalam dalam hal ini ketika super user di Bidang Data di Subbid Data dan Informasi Pegawai ketika mengelola data yang ada dalam SAPA ASN telah secara otomatis data yang sudah dimasukkan oleh admin pada tiap bidang tersebut terupdate sendiri pada SAPA ASN, karena setiap bidang dapat menggunakan SAPA ASN untuk memasukkan data tersebut.

SAPA adalah sistem pendataan berbasis teknologi informasi yang dibangun oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul yang berupaya untuk mewujudkan pendataan yang terintegrasi ini dilakukan dengan membangun mekanisme dan aplikasi pendataan melalui satu pintu. Berdasarkan wawancara dengan Bakti Kurnianto Nur Prasetyo selaku super user SAPA ASN menjelaskan bahwa:

“Kalau dibilang lengkap belum karena setiap hari itu harus mengupdate semakin banyak ditemukan kesalahan itu semakin bagus. Semua data kepegawaian dapat diatangani melalui SAPA ASN, tetapi data yang dishare itu hanya 9 data pokok ASN. Jadi kalau buka SAPA distu ada pencarian data kemudian memasukkan NIP nanti bisa dilihat. Salah satu tujuan SAPA dahulu adalah untuk kami internal, kalau untuk eksternal pencarian data itu untuk memfasilitasi teman-teman mengkroscek datanya yang kedua temen-temen Bank apabila mau mengkroscek data PSN mengajukan kredit ke Bank tidak perlu tanya ke kami lagi bisa mengecek sendiri. “SAPA itu berisi data kepegawaian secara lengkap. Dan data yang disimpan cukup aman dari virus. Data yang dapat diakses oleh masyarakat umum itu adalah 9 data pokok” (Jumat, 22 Desember 2017).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa data yang ada di SAPA ASN belum lengkap karena data kepegawaian harus tiap hari diupdate. Semua data kepegawaian dapat ditangani melalui SAPA ASN, namun tidak semua data dalam SAPA ASN dapat diakses oleh masyarakat umum terutama data pegawai hal tersebut dilakukan untuk menjaga privasi data pegawai. Data pegawai yang hanya bisa diakses oleh umum adalah 9 data pokok. 9 Data pokok tersebut adalah nama, jabatan, NIP baru, NIP lama, tanggal lahir, tanggal mulai tugas CPNS, golongan ruang, pendidikan terakhir dan unit kerja. Biasanya 9 data pokok ASN tersebut diakses pihak BANK untuk mengetahui apakah ASN yang bersangkutan masih bekerja di instansi terkat atau tidak. Berikut ini menu data yang dapat diakses oleh internal (ASN) dan eksternal (Umum):

a. Internal

Bagi ASN yang ada di Kabupaten Bantul untuk dapat mengakses data yang ada pada SAPA ASN berikut car-cara yang dilakukan:

1. Login PNS

Untuk mengakses segala fasilitas/layanan yang ada di SAPA ASN, *user* harus melalui autentikasi terlebih dahulu dengan memasukkan *username* dan *password*.

2. Data ASN

- Pencarian Data ASN

Menu ini menyajikan pencarian data PNS Pemerintah Kabupaten Bantul. Untuk melakukan pencarian data, ketikkan NIP baru PNS dengan format angka 18

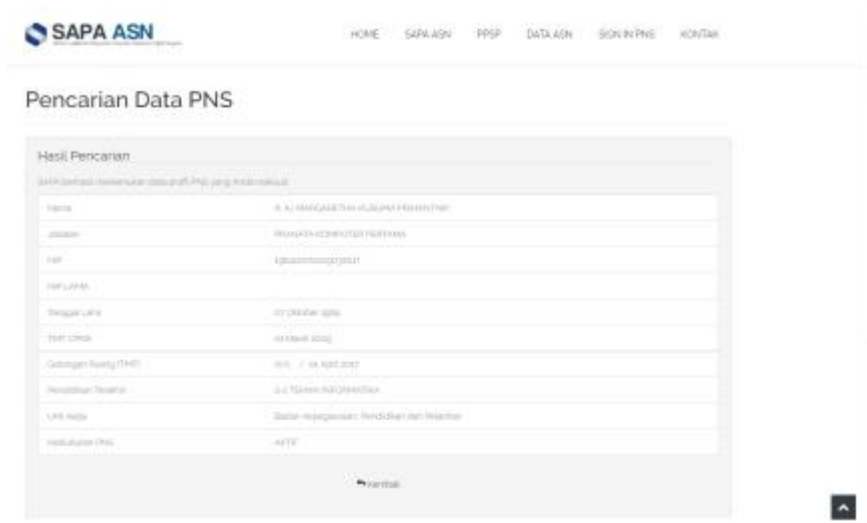
(delapan belas) digit tanpa spasi pada form yang telah disediakan, kemudian klik tombol 'MULAI CARI DATA', seperti pada gambar berikut.



Gambar 4. Pencarian Data PNS

(Sumber Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul)

Sebagai contoh, misalkan kita memasukkan NIP maka akan tampil profil PNS sebagai berikut.



Gambar 5. Hasil Pencarian NIP

(Sumber Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul)

b. Eksternal

1. Statistik PNS

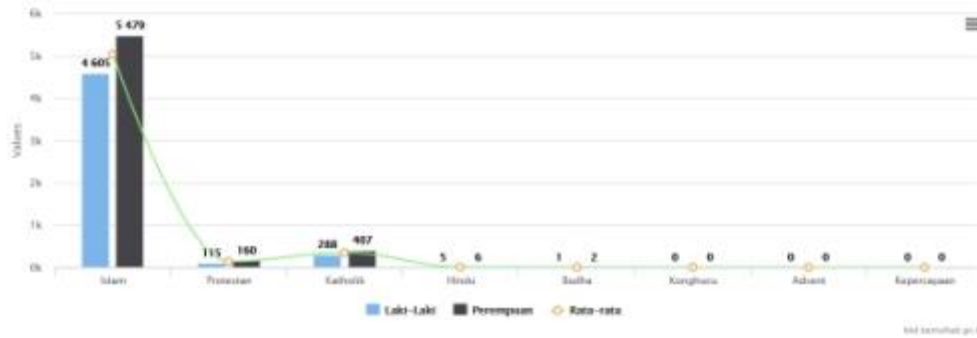
Statistik PNS menampilkan data statistik dan grafik PNS Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin, agama, golongan, pendidikan dan usia secara *real time*.



Gambar 6. Statistik PNS

(Sumber <https://asn.bantulkab.go.id> diakses pada Selasa , 28 November 2017)

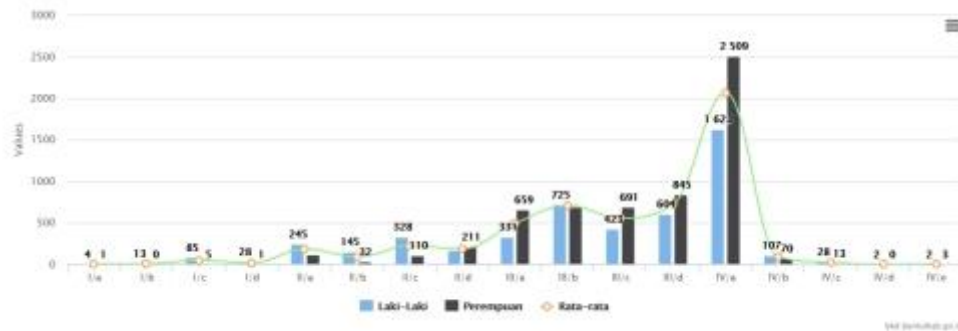
Grafik Data Berdasarkan Agama per Jenis Kelamin



Gambar 7. Grafik Data Berdasarkan Agama

(Sumber <https://asn.bantulkab.go.id> diakses pada Selasa , 28 November 2017)

Grafik Data Berdasarkan Golongan per Jenis Kelamin



137
Gol. I

1358
Gol. II

4966
Gol. III

4357
Gol. IV

Data belum valid : 32 (belum ada data riwayat golongan di database)

Gambar 8. Grafik Data Berdasar Golongan

(Sumber <https://asn.bantulkab.go.id> diakses pada Selasa , 28 November 2017)



Gambar 9. Grafik Data Berdasarkan Pendidikan

(Sumber <https://asn.bantulkab.go.id> diakses pada Selasa , 28 November 2017)



#	Usia (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	18 - 25	4	5	9
2	26 - 35	262	642	904
3	36 - 45	843	1303	2146
4	46 - 55	2270	2663	4933
5	56 - 60	1450	1319	2769

Gambar 10. Grafik Data Berdasarkan Jenis Kelamin

(Sumber <https://asn.bantulkab.go.id> diakses pada Selasa , 28 November 2017)

5. Prosedur

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan antara manusia sebagai brainware dengan mesin untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam membantu fungsi manajemen, operasi serta proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. SIM tersebut menggunakan berbagai komponen didalamnya yang terdiri dari perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) komputer, prosedur sebagai pedoman dalam penggunaan SIM, model manajemen, keputusan dan *data base*.

SAPA di Kabupaten Bantul ditujukan untuk melayani kepegawaian seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Kedepannya, SAPA ASN akan melayani berbagai layanan kepegawaian yang ada di BKPP. Untuk mengakses layanan SAPA ASN dapat dilakukan melalui laman <https://asn.bantulkab.go.id/>, adapun untuk keamanan seluruh pengguna akan diberikan otoritas data pengguna (username dan password) dengan sistem “*Single Sign On*” (SSO).

“Jadi tujuan kedepannya itu adalah sistem “*Single Sign On*” (SSO), *sign in* dengan menggunakan NIP, ketika NIPnya itu sudah didaftarkan menjadi sebagai admin atau administrator pasti bisa mengelola tapi apabila tidak didaftarkan ya tidak bisa” (Kamis, 30 November 2017).

Dari wawancara dengan Yahya Pandega yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai di BKPP Kabupaten Bantul dapat disimpulkan bahwa prosedur dari pengoperasian SAPA ASN adalah sistem “*Single Sign On*” (SSO) yaitu pengguna melakukan *sign in* dengan menggunakan NIP dan NIP tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu menjadi

admin, setelah menjadi admin pengguna cukup satu kali melakukan autentikasi maka langsung dapat menggunakan berbagai layanan yang ada tanpa harus terlebih dahulu (berulang kali) melakukan otentikasi, bahasa sederhananya dapat disebut “sekali login untuk berbagai aplikasi.